



LAPORAN KINERJA

2023

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



dr. H. ANDRI NURJITO, MARS
NIP. 19670909 200112 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan”
 - Diukur dengan indikator Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan formulasi perhitungan :
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 84,50%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 89,86%. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 106,34%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 97,48% terjadi penurunan sebesar 7,62%

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat”
 - Diukur dengan indikator Angka partisipasi masyarakat sadar sehat, dengan formulasi perhitungan :
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 83%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 99,02%. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 119,3%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 93,26% terjadi peningkatan sebesar 5,76%

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah”
 - Diukur dengan indikator Nilai RB perangkat daerah, dengan formulasi perhitungan :
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 3/2023 Tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan pengukuran.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut :

1. Pada tataran Daerah, masih tetap terus dilakukan adalah :
 - a. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - b. Penurunan angka stunting
 - c. Eliminasi *tuberculosis* (TB)
 - d. Pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, kanker dan penyakit tidak menular lainnya
2. Pada tataran nasional, diinisiasinya 6 pilar transformasi kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Transformasi Layanan Primer
 - b. Transformasi Layanan Rujukan
 - c. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
 - d. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
 - e. Transformasi SDM Kesehatan
 - f. Transformasi Teknologi Kesehatan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	
Perangkat Daerah	12
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	13
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	15
1.4. Isu-isu Strategis	20
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	26
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022.....	37
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	38
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	38
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	39
2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2023	41
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	44
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	49
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023.....	51
3.3. Realisasi Anggaran.....	82
3.4. Inovasi.....	85
3.5. Penghargaan	86
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	26
Tabel I.2 Sarana-Prasarana Dinas kesehatan Tahun 2023	34
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	36
Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	37
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	40
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.	41
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023	45
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023	46
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	49
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	50
Tabel III.3 Rumusan Indikator, Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	51
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	52
Tabel III.5 Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	65
Tabel III.6 Rumusan Indikator, Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	68
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	69
Tabel III.8 Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	72
Tabel III.9 Rumusan Indikator, Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	75
Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	76
Tabel III.11 Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	80
Tabel III.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023.....	83

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	12
Gambar I.2. Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13
Gambar I.3. Struktur Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14
Gambar I.4. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15
Gambar II.1. Website Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Gambar II.2. Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Gambar III.1. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Sasaran 1 Tahun 2023	66
Gambar III.2. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Sasaran 2 Tahun 2023	73
Gambar III.3. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Sasaran 3 Tahun 2023	81

BAB I

Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Proses Bisnis*
4. *Isu-isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE Sakip Tahun 2022*

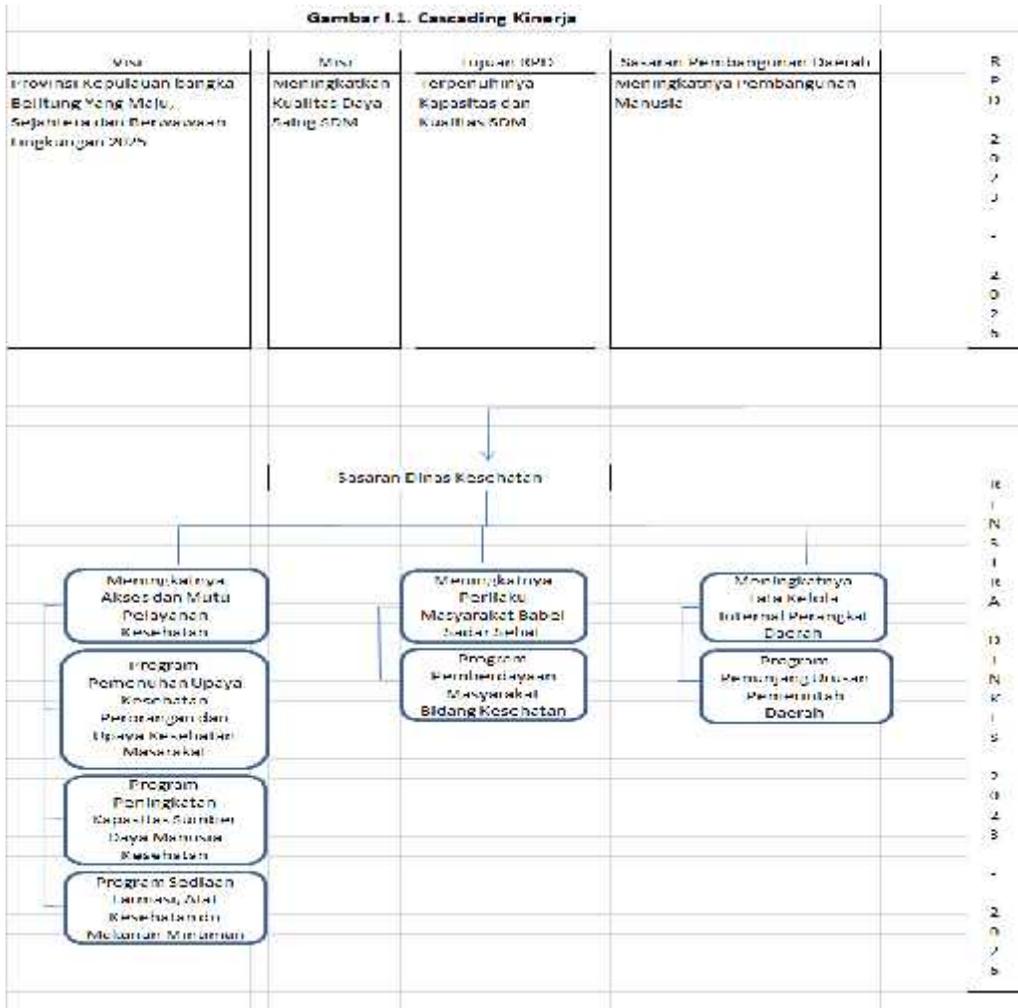
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

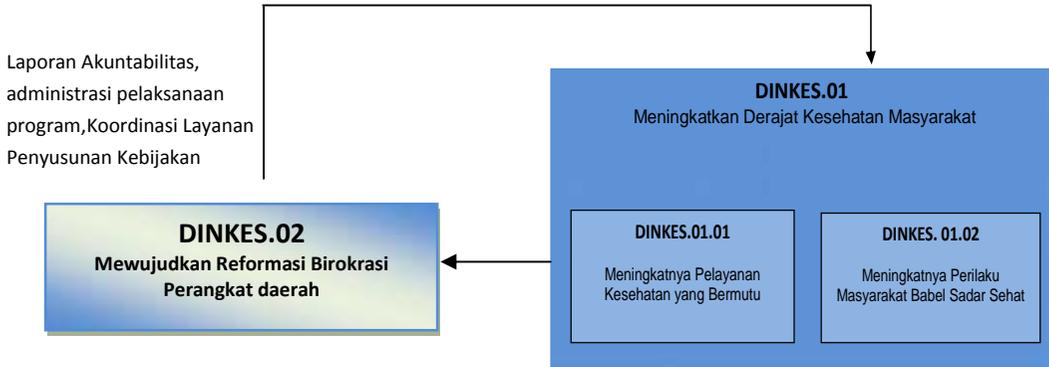


Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2023 - 2026

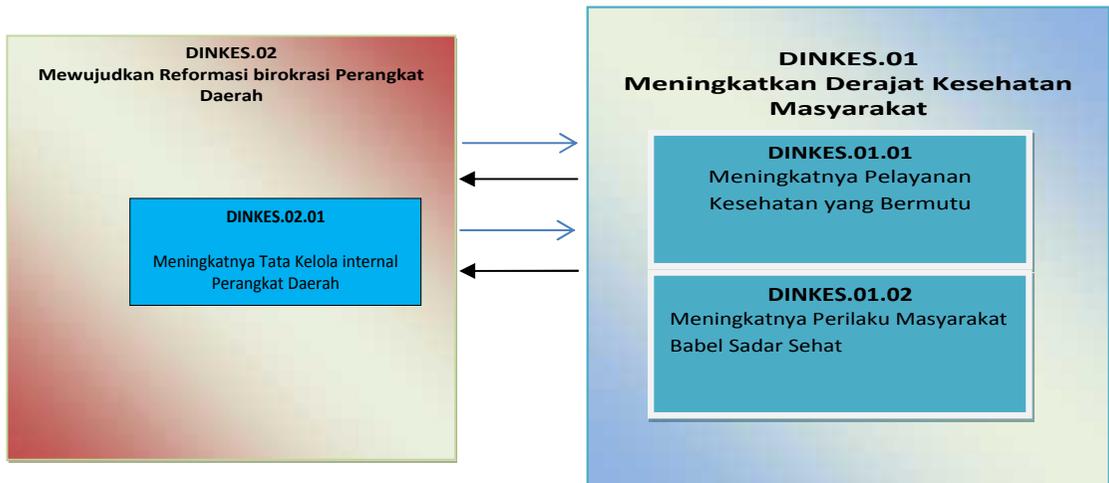
Keterangan : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link

Gambar I.2. Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Administrasi , tata kelola dan kebijakan penganggaran. Kebijakan umum Program Tahunan.Perencanaan, Pemeriksaan akuntabilitas keuangan.Monitoring.Kebijakan Kepegawaian. Layanan fasilitas penyusunan kebijakan. Sinkronisasi Program pembangunan



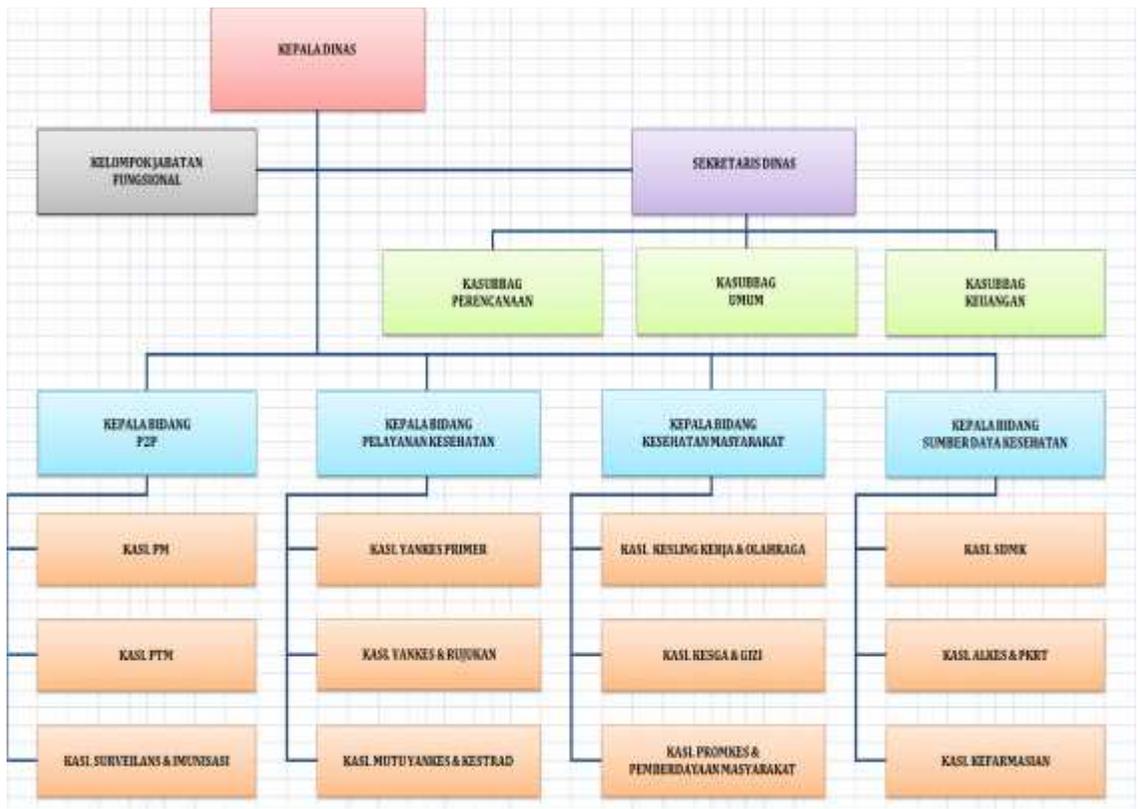
Administrasi, tata kelola dan kebijakan penganggaran. Kebijakan umum Program Tahunan.Perencanaan, Pemeriksaan akuntabilitas keuanganMonitoring, Kebijakan Kepegawaian, Layanan fasilitas penyusunan kebijakan, Sinkronisasi Program pembangunan



Laporan Akuntabilitas, administrasi pelaksanaan program, Koordinasi Layanan Penyusunan Kebijakan

Keterangan : Peta proses bisnis lengkap dapat dilihat melalui link

Gambar I.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung



1.1 . Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar I.4.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan Pada Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. urusan pemerintahan bidang kesehatan. Adapun Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas kesehatan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan

PETA JABATAN

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi kedalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<u>STRUKTURAL</u>	<u>PELAKSANA</u>
A. Kepala Dinas	A. Dibawah Kepala Sub Bagian Umum
B. Sekeretaris	1. Penelaah Teknis Kebijakan/ Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana & Prasarana
1. Kepala Sub Bagian Umum	2. Pengelola Layanan Operasional/ Pengelola Sarana & Prasarana Kantor
2. Sub Koordinator Keuangan /Jf Analis Keuangan Pusat / Daerah Ahli Muda	3. Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Umum
3. Sub Koordinator Perencanaan /Jf Perencana Ahli Muda	B. Dibawah Sub Koordinator Keuangan /Jf Analis Keuangan Pusat / Daerah Ahli Muda
C. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1. Penelaah Teknis Kebijakan/ Bendahara
1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi	2. Penelaah Teknis Kebijakan /Penata Laporan Keuangan
2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat/Jf Analis Kebijakan Muda	3. Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Perkantoran
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga	C. Sub Koordinator Perencanaan /Jf Perencana Ahli Muda
D. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	1. Penelaah Teknis Kebijakan/ Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran
1. Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi	2. Pengolah Data Dan Informasi/ Pengelola Program Dan Kegiatan
2. Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	
3. Sub Koordinator Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa /Jf Penyuluh Kesehatan Ahli Muda	
E. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	
3. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kesehatan Tradisional /Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	

<p>F. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Kefarmasian 2. Sub Koordinator Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga / Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda 3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
<p><u>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</u></p>	<p>D. Dibawah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jf Analis SDM Aparatur 2. Jf Perencana 3. Jf Arsiparis 4. Jf Entomolog Kesehatan 5. Jf Pembimbing Kesehatan Kerja 6. Jf Pranata Humas 7. Jf Dokter 8. Jf Perawat 9. Jf. Perawat Gigi 10. Jf Bidan 11. Jf Sanitarian 12. Jf Nutrisionis 13. Jf Penyuluh Kesehatan Masyarakat 14. Jf Apoteker 15. Jf. Asisten Apoteker 16. Jf Epidemiolog Kesehatan 17. Jf Administrator Kesehatan 18. Jf Perekam Medis 19. Jf Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa 20. Jf Penggerak Swadaya Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Kesehatan Ibu Dan Anak 2. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Gizi 3. Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Program Gizi 4. Pengelola Layanan Kesehatan /Pengelola Program Kesehatan Keluarga <p>E. Dibawah Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat/Jf Analis Kebijakan Ahli Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Kesehatan <p>F. Dibawah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan / Analis Lingkungan Hidup 2. Penelaah Teknis Kebijakan / Analis Kesehatan Kerja 3. Pengolah Data Dan Informasi / Pengelola Penyehatan Lingkungan
	<p>G. Dibawah Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit

	<p style="text-align: center;">Dan Imunisasi</p> <p>H. Dibawah Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Penyakit Menular 2. Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung <p>I. Dibawah Sub Koordinator Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa /Jf Penyuluh Kesehatan Ahli Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan 2. Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Penyakit Tidak Menular <p>J. Dibawah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analis Kesehatan <p>K. Dibawah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan /Analis Pengembangan Teknologi Medis 2. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Kesehatan 3. Pengelola Layanan Kesehatan /Pengelola Rujukan Kesehatan <p>L. Dibawah Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kesehatan Tradisional /Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Kesehatan
--	---

	<p>M. Dibawah Kepala Seksi Kefarmasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Perkantoran /Pengadministrasi Gudang Farmasi <p>N. Dibawah Sub Koordinator Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga / Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analisis Kesehatan <p>O. Dibawah Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaah Teknis Kebijakan /Analisis Fasilitasi Dan Peningkatan Kompetensi 2. Pengelola Layanan Kesehatan /Pengolah Bahan Registrasi Dan Sertifikasi 3. Operator Layanan Kesehatan /Pranata Teknologi Informasi Komputer
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	
<p><u>JABATAN STRUKTURAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> A. Kepala UPTD B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha C. Kepala Seksi Klinik dan Kesehatan Masyarakat D. Kepala Seksi Pengendalian Mutu, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat <p><u>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter 3. Pranata Laboratorium Kesehatan 	<p><u>JABATAN PELAKSANA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> A. Dibawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Penelaah Teknis Kebijakan /Bendahara 2. Penelaah Teknis Kebijakan /Penyusun rencana kegiatan dan anggaran 3. Pengolah Data dan Informasi /Pengelola Kepegawaian 4. Pengelola Layanan Operasional

4. Perawat	/Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
5. Pembimbing Kesehatan Kerja	
6. Teknisi Elektromedik	5. Pengadministrasi Perkantoran / Pengadministrasi Umum
7. Sanitarian	
8. Asisten Apoteker	B. Dibawah Kepala Seksi Klinik dan Kesehatan Masyarakat
9. Teknisi Elektromedik	
10. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	1. Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analisis Kesehatan
11. Pranata Komputer	2. Penata Kelola obat dan makanan /Analisis Obat dan Makanan
	C. Dibawah Kepala Seksi Pengendalian Mutu, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat
	1. Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analisis Kesehatan

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2023

1.2. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, antara lain sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebanyak 26 orang menurun dari tahun 2019 sebanyak 36 orang. Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia, infeksi dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 3.5.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kematian Ibu Menurut Faktor Penyebab Kematian Di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	KEMATIAN IBU				Jumlah
		Perdarahan	HDK	Infeksi	Lain-lain	
1	Bangka	0	0	0	5	5
2	Belitung	0	1	0	2	3
3	BangkaBarat	1	1	0	0	2
4	BangkaTengah	1	2	0	1	4
5	BangkaSelatan	0	1	0	1	2
6	BelitungTimur	1	2	0	1	4
7	Pangkalpinang	1	4	0	1	6
	<i>Provinsi</i>	4	11	0	11	26

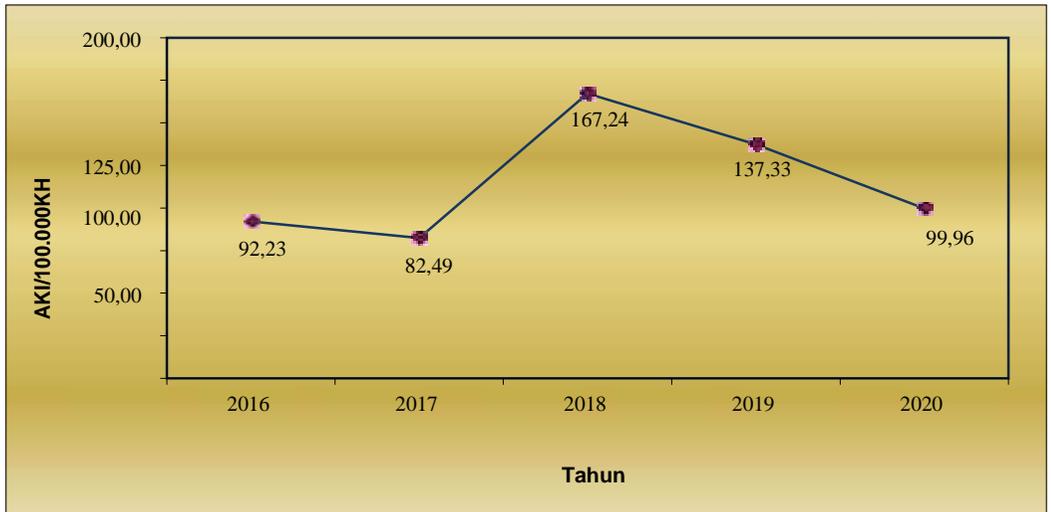
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Kematian ibu berdasarkan penyebab kematiannya adalah 4 orang atau 15,40% karena perdarahan, 11 orang atau 42,30% karena hipertensi dalam kehamilan dan 9 orang atau 34,60% disebabkan karena lain-lain (emboli air ketuban, emboli paru, syok kardiogenik, stroke haemoragic, cardio myopati, tumor otak, abortus infeksiosa, hepatitis dan ginjal). Kematian ibu paling banyak terdapat di Kota Pangkalpinang sebanyak 6 orang (23,07% dari total kematian ibu) dan yang terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan masing-masing 2 orang (7,69% dari total kematian ibu). Hal ini berhubungan adanya Surat Keputusan dari kepala daerah tentang penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19. Situasi ini menurunkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan dan nifas. Adanya pembatasan kunjungan pasien ke puskesmas di mana pasien

membuat janji temu dengan petugas kesehatan di puskesmas. Ibu hamil merasa takut datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah ibu hamil dan nifas untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah harus dengan protokol kesehatan.

Pada tahun 2019 ada beberapa puskesmas yang ditutup sementara karena ada beberapa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga pelayanan kesehatan ditunda dan tenaga kesehatan harus melakukan karantina. Selanjutnya dengan era adaptasi kebiasaan baru, masyarakat mulai antusias berkunjung ke fasilitas kesehatan sehingga pelayanan kesehatan mulai meningkat dan pelayanan di UKBM mulai dilakukan melalui protokol kesehatan. Ketersediaan dan keterfungsian puskesmas PONEK (42,18% dari total puskesmas) dan RS PONEK di kabupaten/kota belum optimal, untuk itu perlu dibentuk puskesmas PONEK dan RS PONEK yang didukung dengan tenaga yang sudah dilatih dan kompeten dalam penanganan kasus kegawatdaruratan serta ketersediaan alat dan sarana yang memadai. Selain itu persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan hanya 93,3% dan tempat kematian ibu paling banyak terjadi di rumah sakit 76,92%, di puskesmas 3,84, di rumah 11,53% dan di perjalanan 7,6%. Angka Kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5
Trend Angka Kematian Ibu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 - 2020



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Prov. Babel

2. Angka Kematian Bayi dan Balita

Kematian bayi (0 – 12 bln) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 186 orang menurun dari tahun 2019 sebanyak 188 orang. Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 paling banyak terdapat di Kabupaten Belitung (24,73% dari total kematian bayi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang (4,83% dari total kematian bayi).

Kematian balita (0 – 5 thn) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 213 orang meningkat dari tahun 2019 sebanyak 209 orang. Jumlah kematian balita tahun 2020 paling banyak terdapat di Kabupaten Belitung (23,94% dari total kematian balita) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang (5,16% dari total kematian balita).

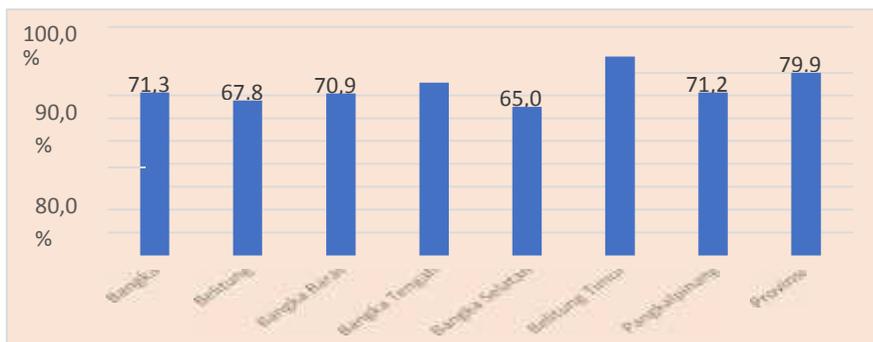
3. Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru dan sebagian kecil menyerang organ tubuh selain paru. Estimasi insiden TBC di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 842.000 kasus, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung estimasi insiden pada tahun 2020 sebanyak 5.917 kasus.

Pemerintah bertekad untuk mencapai Eliminasi TB tahun 2030 dengan target *Case Detection Rate* (CDR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019 sebesar 49%, namun capaian *Case Detection Rate* (CDR) hanya 37%, sehingga target *Case Detection Rate* (CDR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2019 belum tercapai sesuai dengan data yang terdapat di Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT), dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1

Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar Tahun 2019



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Prov. Bangka Belitung

Dari grafik di atas menunjukkan persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2020 dari 7 kabupaten/kota tidak ada yang mencapai target 100%. Untuk persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yang tertinggi dari Kabupaten Belitong Timur (87,1%), sedangkan yang terendah Kabupaten Bangka Selatan (65%).

4. Pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan penyakit tidak menular lainnya

Masih tingginya kasus penyakit menular (malaria, HIV/AIDS, tuberkulosis dan DBD) dan penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes mellitus). Penyakit menular seperti malaria masih menunjukkan jumlah kasus yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Kasus demam berdarah juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari angka incidence rate (IR) per 100.000 penduduk yaitu pada tahun 2017 sebesar 18,03 menjadi 70,41 pada tahun 2019. Untuk kasus HIV cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,67% dari tahun 2018 sebesar 1,39%. Untuk penyakit tuberkulosis, persentase keberhasilan pengobatan pasien TB di Bangka Belitung masih rendah yaitu baru 89% pada tahun 2019, dimana angka tersebut masih berada dibawah target nasional yaitu 90%. Untuk kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir. Dimana tahun 2016 sebanyak 32.468 kasus meningkat menjadi 167.666 kasus pada tahun 2018.

1.2 Dukungan SDM, Sarana - Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan (Struktura/ Fungsiona/ Pelaksana)	FORMASI (PETA JABATAN)		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN	
			Jlh	Kualifikasi Pendidikan	Jlh	Kualifikasi Pendidikan	L	P
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
1.	KEPALA DINAS	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 ADM RS	1	0
2.	SEKERETARIS	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Hukum	1	0
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Ekonomi Pembangunan	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan/ Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana & Prasarana	Pelaksana	3	S-1/D-4	3	S-1 Keperawatan/ Ekonomi/ ADM Negara	0	3
	Pengelola Layanan Operasional/ Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	Pelaksana	3	D-3	0	-	0	0
	JF Pranata Humas Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	JF Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Komputer	0	1
	JF Arsiparis Pelaksana	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	SMA/SMK	0	-	0	0
4.	SUB KOORDINATOR KEUANGAN /JF ANALIS KEUANGAN PUSAT / DAERAH AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Manajemen	0	1
	Penelaah Teknis Kebijakan/ Bendahara	Pelaksana	1	S-1/D-4	1	S-1 Ekonomi	0	1
	Penelaah Teknis Kebjakan /Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	3	S-1/D-4	3	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Ekonomi/ Akuntansi	1	2

	Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	1	SMA/SMK	0	-	0	0
5.	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN /JF PERENCANA AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Ekonomi	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan/ Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Pelaksana	5	S-1/D-4	3	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Ekonomi/ Hukum	1	2
	Pengolah Data dan Informasi/ Pengelola Program dan Kegiatan	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	1	SMA/SMK	0	-	0	0
	JF Pranata Komputer Penyelia	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan /Mahir	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Manajemen Informatika	0	1
	JF Pranata Komputer Pelaksana	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
6.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Kedokteran Tropis	0	1
7.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	Struktural	1	S-1/D-4	1	D-3 Kebidanan	0	1
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Kesehatan Ibu dan Anak	Pelaksana	6	S-1/D-4	4	D-4 Kebidanan/S-1 Kesehatan Masyarakat	0	4
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Gizi	Pelaksana	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	JF Nutrisionis Pelaksana / Terampil	Fungsional	2	D-3	1	D-3 Gizi	0	1
	Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Program Gizi	Pelaksana	2	D-3	1	D-3 Gizi	0	1
	Pengelola Layanan Kesehatan /Pengelola Program Kesehatan Keluarga	Pelaksana	2	D-3	0	-	0	0
8.	SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Administrasi Publik	0	1
	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama/PPPK	Fungsional	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis kesehatan	Pelaksana	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
9.	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Epidemiologi	0	1
	Penelaah Teknis Kebijakan / Analis Lingkungan Hidup	Pelaksana	2	S-1/D-4	2	S-1 Kesehatan Masyarakat	2	0
	Penelaah Teknis Kebijakan / Analis Kesehatan Kerja	Pelaksana	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	Pengolah Data dan Informasi / Pengelola Penyehatan Lingkungan	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
	JF Sanitarian Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S2 Kesehatan Masyarakat	0	1

	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Sanitarian Penyelia	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan /Mahir	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	JF Sanitarian Pelaksana / Terampil	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
10.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Struktural	1	S-1/D-4	0	-	0	0
11.	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Promkes	1	0
	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	0
	Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Pelaksana	1	D-3	1	D-3 Komputer	1	0
12.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analis Penyakit Menular	Pelaksana	2	S-1/D-4	2	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	1
	Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
	JF Entomolog Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	3	S-1/D-4	2	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	2
	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
13.	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA /JF PENYULUH KESEHATAN AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Pelaksana	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Pengelola Layanan Kesehatan / Pengelola Penyakit Tidak Menular	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
14.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	Struktural	1	S-1/D-4	0	-	0	0
15.	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	Struktural	1	S-1/D-4	1	S2 Manajemen	1	0
	JF Dokter Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Perekam Medis Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Perawat Ahli Pertama	Fungsional	3	S-1/D-4	2	S-1 Keperawatan	0	2
	JF Perawat Penyelia	Fungsional	2	D-3	3	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Keperawatan/ D-3 Keperawatan	0	3

	JF Apoteker Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0		0	0
	JF Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	Fungsional	7	D-3	2	D-3 Keperawatan	1	1
	Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analisis Kesehatan	Pelaksana	3	S-1/D-4	3	S-2 Kesehatan Masyarakat/ S-1 Kesehatan Masyarakat	0	3
	JF Perawat Pelaksana /Terampil	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Keperawatan	1	0
	JF Perawat gigi pelaksana/Terampil	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Terapis Gigi dan Mulut	0	1
	JF Bidan Pelaksana /Terampil	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Kebidanan	0	1
	JF Asisten Apoteker Terampil	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Nutrisi Terampil	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Gizi	0	1
16.	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	0
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan /Analisis Pengembangan Teknologi Medis	Pelaksana	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analisis Kesehatan	Pelaksana	5	S-1/D-4	4	S-2 Sistem Informasi Manj. Kes/ S-2 Manajemen/ S-1 Kesehatan Masyarakat/ S-1 Keperawatan	0	4
	Pengelola Layanan Kesehatan /Pengelola Rujukan Kesehatan	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
17.	SUB KOORDINATOR MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEHATAN TRADISIONAL /JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Epidemiologi	1	0
	JF administrator Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan / Analisis Kesehatan	Pelaksana	6	S-1/D-4	6	S-2 Manajemen/ S-1 Kesehatan Masyarakat	1	5
18.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	Struktural	1	S-1/D-4	0	-	0	0
19.	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Apoteker	1	0
	JF Asisten Apoteker Penyelia	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan /Mahir	Fungsional	2	D-3	1	D-3 Farmasi	0	1
	JF Asisten Apoteker Pelaksana / Terampil	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	JF Apoteker Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-1 Farmasi	1	0

	Pengadministrasi Perkantoran /Pengadministrasi Gudang Farmasi	Pelaksana	1	SMA/SMK	1	SLTA	1	0
20.	SUB KOORDINATOR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA / JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	JF Administrator Kesehatan Pertama/ PPPK	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-1 Apoteker	0	1
	Penata Kelola Layanan Kesehatan /Analisis Kesehatan	Pelaksana	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
21.	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-1 Psikologi	0	1
	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan /Analisis Fasilitas dan Peningkatan Kompetensi	Pelaksana	1	S-1/D-4	3	S-1 Keperawatan/ Ekonomi/ Komputer	2	1
	Pengelola Layanan Kesehatan /Pengolah Bahan Registrasi dan Sertifikasi	Pelaksana	1	D-3	1	D-3 Adm. RS	0	1
	Operator Layanan Kesehatan/Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
22.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						0	0
	JF Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-2 Manajemen	1	0
	JF Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Entomolog Kesehatan Ahli Muda	Fungsional	2	S-1/D-4	1	S-2 Biomedik Kedokteran	1	0
	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	Fungsional	3	S-1/D-4	2	S-1/S-2 Kesehatan Masyarakat	1	1
	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	Fungsional	3	S-1/D-4	2	S-1/S-2 Kesehatan Masyarakat	0	2
	JF Pranata Humas Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-2 Manajemen	0	1
	JF Nutrisi Ahli Madya	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-2 Biomedik	1	0
	Jf. Apoteker Madya	Fungsional	0	S-1/D-4	1	S-2	1	0
	Jf. Perawat Muda	Fungsional	0	S-1/D-4	2	S-1 Keperawatan	0	2
	Jf. Nutrisi Ahli Pertama	Fungsional	0	S-1/D-4	1	S-1 Ilmu Gizi	0	1
	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Fungsional	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	1
	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Fungsional	3	S-1/D-4	3	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	3
	JF Apoteker Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-1 Apoteker	1	0
	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Fungsional	7	S-1/D-4	5	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Keperawatan	2	3

	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Fungsional	5	S-1/D-4	2	S-1 Kesehatan Masyarakat/Keperawatan	0	2
	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN								
1.	KEPALA UPTD	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Kesehatan	1	0
2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Struktural	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Pranata Komputer Pelaksana	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan/Bendahara	Pelaksana	3	D-3	2	S-1 Ekonomi / D-3 Adm. Rumah Sakit	1	1
	Penelaah Teknis Kebijakan/Penyusun rencana kegiatan dan anggaran	Pelaksana	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Pengolah Data dan Informasi/Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
	Pengelola Layanan Operasional/Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Pelaksana	1	D-3	0	-	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran/Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	SLTA	0	-	0	0
3.	KEPALA SEKSI KLINIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Biologi	1	0
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	2	S-1/D-4	2	S-1 Biologi	0	2
	Dokter Ahli Pertama	Fungsional	0	S-1/D-4	2	S-1 Kedokteran	0	2
	Perawat Ahli Pertama	Fungsional	0	S-1/D-4	2	S-1 Keperawatan	0	2
	Perawat Penyelia	Fungsional	3	D-3	1	D-3 Keperawatan	1	0
	Perawat Mahir	Fungsional	5	D-3	4	S-1 Keperawatan /D-3 Keperawatan	0	4
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Perawat Pelaksana	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan/Analisis Kesehatan	Pelaksana	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Penata Kelola obat dan makanan/Analisis Obat dan Makanan	Pelaksana	1	S-1/D-4	1	S-1 Farmasi	1	0

4.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT	Struktural	1	S-1/D-4	1	S-2 Kesehatan	1	0
	Sanitarian Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Asisten Apoteker Penyelia	Fungsional	1	D-3	1	D-3 Farmasi	0	1
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Teknisi Elektromedik Pelaksana Lanjutan	Fungsional	1	D-3	0	-	0	0
	Teknisi Elektromedik Pelaksana	Fungsional	2	D-3	0	-	0	0
	Penata Kelola Layanan Kesehatan/Analisis Kesehatan	Pelaksana	2	S-1/D-4	1	S-1 Kesehatan Masyarakat	1	0
5.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							
	Dokter Ahli Madya	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-1 Kedokteran	1	0
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	Fungsional	2	S-1/D-4	2	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Biologi	0	2
	Dokter Spesialis Ahli Muda	Fungsional	2	S-1/D-4	0	-	0	0
	Dokter Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	1	S-2 Pantologi Klinis	0	1
	Perawat Ahli Muda	Fungsional	2	S-1/D-4	2	S-1 Keperawatan	0	2
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Fungsional	3	S-1/D-4	2	S-1 Biologi	2	0
	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	Fungsional	2	S-1/D-4	0	-	0	0
	Teknisi Elektromedik Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Sanitarian Ahli Muda	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	Fungsional	1	S-1/D-4	0	-	0	0
TOTAL ASN			234		137		42	95
	<u>Pegawai Honorer</u>							
	Pramu Bakti	Honorer	0	-	11	S-1 Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/ Hukum/ Teknik Infomatika/ Kesehatan Masyarakat/ Pendidikan Dunia Bisnis- Ekonomi	4	7
	Pramu Bakti	Honorer	0	-	2	D-III Perawat/ Farmasi	2	0

	Pramu Kebersihan	Honorar	0	-	3	S-1 Sistem Informasi/ Kesehatan Masyarakat	0	3
	Pramu Kebersihan	Honorar	0	-	4	SMA/SMK	1	3
	Petugas Keamanan/Satuan Pengamanan	Honorar	0	-	5	SMA/SMK	5	0
	Petugas Keamanan/Satuan Pengamanan	Honorar	0	-	3	S-1 Kesehatan Masyarakat/ Teknik Informatika / Manajemen	3	0
	Pengemudi	Honorar	0	-	3	SLTA	3	0
	Pengemudi	Honorar	0	-	2	D-3 Kesling/ Gizi	2	0
	Pengemudi	Honorar	0	-	2	S-1 Manajemen/ Teknik Informatika	2	0
	Petugas Taman/Pramu Taman	Honorar	0	-	1	S-1 Akuntansi	0	1
	Petugas Taman/Pramu Taman	Honorar	0	-	4	SMA/SMK/MAN	1	3
	Apoteker	Honorar	0	-	2	S-1 Apoteker (Profesi)	0	2
	Tenaga Teknis Kesehatan	Honorar	0	-	2	S-1 Biologi/ Administrasi Bisnis	0	2
	Tenaga Teknis Kesehatan	Honorar	0	-	2	D-III Analisis Kesehatan	2	0
	Bidan	Honorar	0	-	6	D-3 Kebidanan	0	6
	Tenaga Administrasi	Honorar	0	-	2	S-1 Keperawatan/ Kesejahteraan Sosial	0	2
	Perawat	Honorar	0	-	3	S-1 Profesi Ners/ Kesehatan Masyarakat	1	2
	Perawat	Honorar	0	-	7	D-3 Keperawatan	3	4
	Perawat Gigi	Honorar	0	-	1	D-3 Keperawatan Gigi	0	1
	Dokter Gigi	Honorar	0	-	1	S-1 Dokter Gigi (Profesi)	0	1
	Dokter	Honorar	0	-	2	S-1 Dokter Umum (Profesi)	1	1
			0		68		30	38

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 118 orang (57,56%), S2 sebanyak 22 orang (10,73%), D3 sebanyak 39 orang (19,02%), dan SMU/SMK sebanyak 16 orang (9,19%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana - Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	TANAH	2	53.414.670,00
	TANAH	2	53.414.670,00
2	PERALATAN DAN MESIN		22.389.363.099,23
	ALAT BESAR	7	714.379.990,00
	ALAT ANGKUTAN	43	4.575.094.770,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	33	881.393.500,00
	ALAT PERTANIAN	1	1.950.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	348	3.543.734.459,0
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30	303.165.511,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	55	1.143.927.459,07
	ALAT LABORATORIUM	98	9.403.202.406,16
	ALAT PERSENJATAAN	11	27.200.000,00
	KOMPUTER	231	1.754.425.004,00
	ALAT EKSPLORASI	-	0
	ALAT PENGEBORAN	-	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	3	40.890.000,00
	ALAT PERAGA	-	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0
	RAMBU-RAMBU	-	0

	PERALATAN OLAHRAGA	-	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		14.348.017.341,06
	BANGUNAN GEDUNG	31	14.348.017.341,06
	MONUMEN	-	0
	BANGUNAN MENARA	-	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	0
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		624.358.436,52
	JALAN DAN JEMBATAN	-	0
	BANGUNAN AIR	4	193.566.421,00
	INSTALASI	5	380.892.015,52
	JARINGAN	1	49.900.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA		213.506.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	54	16.661.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN /KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	0
	HEWAN	-	0
	BIOTA PERAIRAN	-	0
	TANAMAN	-	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	196.845.000,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan		49.198.000,00
	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	49.198.000,00
7	ASET LAINNYA		475.120.933,00
	ASET LAIN-LAIN		475.120.933,00
	ASET LAIN-LAIN	1	475.120.933,00
	TOTAL		37.677.857.546,81

Sumber : Buku Inventaris Dinas Kesehatan Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Kendaraan operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 6 unit kendaraan operasional, 5 unit ambulance, 6 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding

jumlah pegawai hanya sebesar mendekati 0,68. Walaupun demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2022	Rp. 19.972.992.516,-	Rp. 57.649.744.903,-	Rp. 77.622.737.419,-
2023	Rp. 19.663.160.000,-	Rp. 79.032.728.367,-	Rp. 98.695.888.367,-

Sumber : DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 21.382.983.464,-. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran untuk belanja bantuan iuran jaminan kesehatan pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan demikian tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/135/LHE/INPTD/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dipertahankan dalam jangka masa 1 periode perencanaan strategis dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 2. Mengupayakan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan menetapkan indikator kinerja individu (IKI) dan dilakukan pemantauan kinerja/output pegawai dengan dialog kinerja atau penilaian sejawad 3. Mengupayakan memiliki teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja yang valid dan dapat diandalkan guna pengukuran capaian kinerja 4. Laporan kinerja hendaknya dapat di reviu secara berjenjang sesuai hierarki proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dengan dibuat laporan hasil reviu berjenjang 5. Mengupayakan membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal 	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2022 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat terkait evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026 2. a. Melakukan rapat penyusunan dan penetapan indikator kinerja individu (IKI) b. Melakukan rapat pemantauan kinerja/output pegawai dengan dialog kinerja atau penilaian sejawad 3. Melakukan rapat terkait Aplikasi satu data kesehatan (ASDK) 4. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala 5. Menyusun standar operasional prosedur (SOP)

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi:

7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
8. Strategi dan Arah Kebijakan
9. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
10. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
11. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023–2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya pembangunan manusia. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Adapun sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	86,75%	84,50	85	85,50	86	86	
2	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	%	82%	83	84	84,50	85	85	
3	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	Nilai	25	27,50	27,60	27,70	27,80	27,80	

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan keluarga dan Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui kebijakan Perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara sinergis, komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan, mutu, akses, dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. 2. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas 3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting 4. Meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
		1. Pengurangan risiko akibat penyakit melalui kebijakan pencegahan pengendalian penyakit yang sinergis, komprehensif dan bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular 2. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular dan tidak menular 3. Peningkatan surveilans dan imunisasi 4. Penanganan dan penanggulangan KLB dan krisis kesehatan
		2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 2. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 3. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu

2	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi
		2. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
3	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.773.809.572,-	66.814.121.812,-	2.040.312.240,-
		1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.713.114.952,-	2.588.682.998,-	(124.431.954,-)
		1.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	61.092.608.759,-	63.312.231.353,-	2.219.622.594,-

		Tingkat Daerah Provinsi			
		1.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	141.973.761,-	156.494.561,-	14.520.800,-
		1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	826.112.100,-	756.712.900,-	(69.399.200,-)
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.934.242.972,-	2.890.483.819,-	(43.759.153)
		2.1 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	126.999.500,-	124.439.080,-	(2.560.420)
		2.2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.807.243.472,-	2.766.044.739,-	(41.198.733)
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	128.602.300,-	124.602.100,-	(4.000.200)
		3.1 Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	68.602.300,-	66.602.100,-	(2.000.200)

		3.2 Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	60.000.000,-	58.000.000,-	(2.000.000)
2.Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	802.372.487,-	994.372.487,-	192.000.000,-
		1.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	120.000.000,-	120.000.000,-	0
		1.2. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	619.172.887,-	619.172.887,-	0
		1.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	63.199.600,-	255.199.600,-	192.000.000,-
4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	3.Nilai RB perangkat daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	27.730.861.256,-	27.872.308.149,-	141.446.893
		1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.954.569,-	195.053.900,-	52.099.311,-
		1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.160.500.000,-	19.682.995.300,-	(477.504.700)

	1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.174.542,-	255.112.200,-	(28.062.342)
	1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.350.538,-	783.904.290,-	290.553.752,-
	1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.804.545,-	215.000.000,-	45.195.455,-
	1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.747.126.090,-	2.303.324.095,-	(443.801.995,-)
	1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	686.217.822,-	837.843.822,-	151.626.000,-
	1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	3.047.733.150,-	3.599.074.542,-	551.341.392,-
	Total Anggaran Yang Berkaitan Langsung Dengan Pencapaian Sasaran	96.369.888.587,-	98.695.888.367,-	2.325.999.780,-

Sumber : DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023	Target Triwulan
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	%	84,5	Triwulan I : 51,5
					Triwulan II : 61,65
					Triwulan III : 72,15
					Triwulan IV : 84,5
2	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat	%	83	Triwulan I : 52,53
					Triwulan II : 61,38
					Triwulan III : 70,23
					Triwulan IV : 83
3	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai Absolut	27,5	Triwulan I : -
					Triwulan II : -
					Triwulan III : -
					Triwulan IV : 27,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reuiu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan 2023	Target Triwulan
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	%	84,5	Triwulan I : 51,5
					Triwulan II : 61,65
					Triwulan III : 72,15
					Triwulan IV : 84,5
2	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	AngkaPartisipasi Masyarakat Sadar Sehat	%	83	Triwulan I : 52,53
					Triwulan II : 61,38
					Triwulan III : 70,23
					Triwulan IV : 83
3	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai Absolut	27,5	Triwulan I : -
					Triwulan II : -
					Triwulan III : -
					Triwulan IV : 27,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 2,01%.
 2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
 3. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 3.1. Program Dukungan Manajemen : Rp. 978.319.000,-
 - 3.2. Program Kesehatan Masyarakat : Rp. 3.138.709.000,-
 - 3.3. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN : Rp. 1.986.313.000,-
 - 3.4. Program Pencegahan dan Pengendalian : Rp. 2.134.583.000,-
 - 3.5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi : Rp. 1.813.611.000,-
- Total : Rp. 10.051.535.000,-**

Adapun pemanfaatan dana dekonsentrasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan :

1. Penguatan kesehatan masyarakat di provinsi
2. Penguatan pelayanan kesehatan di provinsi
3. Peningkatan kualitas SDM kesehatan di provinsi
4. Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi
5. Peningkatan kesehatan jemaah haji
6. Pengelolaan krisis kesehatan
7. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara
8. Pengelolaan data dan informasi kesehatan

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Website Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung, www.dinkes.babelprov.go.id adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar II.1 Website Dinkes Prov. Kep. Bangka Belitung



- b. Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. [Ig.dinkesbabel](https://www.instagram.com/dinkesbabel) adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar II.2 Instagram Dinkes Prov. Bangka Belitung



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indikator: Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu Formula Perhitungan : Rata-rata nilai persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase sediaan farmasi alkes, makanan dan minuman	%	86,75%	97,48%	84,5%	89,86%	106,34	Sangat Baik	86
2.	Meningkatnya Perilaku Masyarakat Babel Sadar Sehat	Indikator : Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat Formula Perhitungan : Rata-rata nilai persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif	%	82%	93,26%	83%	99,02%	119,3	Sangat Baik	85
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indikator : Nilai RB Perangkat Daerah Formula Perhitungan : Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi	Nilai Absolut	25	29,89	27,5	Tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja	-	-	27,8

3.2. Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kinerja sasaran Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan diukur dengan indikator Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	Rata-rata nilai persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase sediaan farmasi alkes, makanan dan minuman

Kinerja sasaran Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Rata-rata nilai persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase sediaan farmasi alkes, makanan dan minuman. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 89,95% atau sebesar 106,45% dari target 84,5%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	97,48%	84,5%	89,86%	106,34	86%	104,49

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 89,86%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,34%, dengan demikian telah mencapai target tahun 2023.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 97,48%, terhadap target tahun lalu sebesar 85% terdapat penurunan sebesar 7,62%. Hal tersebut disebabkan adanya satu indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target yaitu pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikator kinerja persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat dengan Indikator :

1.1. Pertama, Persentase peningkatan kesehatan masyarakat dengan formula perhitungan indikator ini adalah Rata-rata nilai (Persentase pelayanan kesehatan Ibu hamil + Persentase pelayanan kesehatan Ibu bersalin + Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir + Persentase pelayanan kesehatan balita + Persentase pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar + Persentase pelayanan kesehatan usia produktif + Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut). Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(87,44+93,33+96,22+97,51+99,33+86,70+87,53)/7 \times 100\% = 92,58\%$ dari target 86% atau sebesar 107,65%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 87,56%. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku.
2. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, dan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan yang ada.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di setiap desa/kelurahan.
4. Penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan terkait program peningkatan kesehatan masyarakat
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat
6. Mengoptimalkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor serta

penguatan sumber daya dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*).

1.2. Kedua, Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit dengan formula perhitungan indikator ini adalah Rata-rata nilai (Persentase pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi + Persentase pelayanan kesehatan penderita DM + Persentase pelayanan kesehatan ODGJ + Persentase pelayanan kesehatan TB + Persentase pelayanan kesehatan HIV + Persentase pelayanan kesehatan krisis kesehatan + Persentase pelayanan kesehatan penduduk pada situasi KLB)/7 X 100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit. Capaian kinerja indikator ini adalah $(80,61+101,45+104,54+86,47+90,83+100+100)/7 \times 100\% = 94,88\%$ dari target 94% atau sebesar 100,94%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan dengan Kabupaten/kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan kesehatan di Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit
2. Melakukan kegiatan pelatihan- pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas program pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular serta surveilans kesehatan
3. Melakukan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara rutin dan berkesinambungan dan terintegrasi dengan bidang lainnya sesuai program terkait

4. Melakukan ekspansi pelayanan kesehatan untuk program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, memperluas serta memperbanyak akses layanan sehingga memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dengan konsep *Distric Public Privat Mix* (DPPM) yang dikembangkan di semua kabupaten/kota.
5. Melakukan kerjasama dengan Organisasi profesi dan komunitas terkait penanggulangan HIV dan Tuberkulosis terutama dalam hal pengobatan pasien dan dukungan psikososial
6. Melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait, terutama dalam penyebarluasan informasi terkait penyakit menular dan tidak menular
7. Melakukan kegiatan analisa data, penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular yang berpotensi KLB dan wabah sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin
8. Aktif melakukan surveilans dan deteksi dini penyakit di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1.3. Ketiga, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang minimal terakreditasi madya dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(89/91) \times 100\% = 97,8\%$ dari target 85% atau sebesar 115,06%. Capaian indikator kinerja ini dilakukan melalui upaya-upaya :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi puskesmas
2. Melakukan pertemuan persiapan akreditasi dan reakreditasi rumah sakit
3. Melakukan pembinaan terkait akreditasi rumah sakit

1.4. Keempat, Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dikali 100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(59/64) \times 100\% = 92,19\%$ dari target 87% atau sebesar 105,96%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya-upaya :

1. Melakukan Pemantauan ketersediaan obat dan vaksin esensial di instalasi farmasi Dinas Kesehatan kabupaten/kota
2. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terkait laporan Indikator ketersediaan Obat dan Vaksin di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten kota secara berkala setiap bulan

1.5. Kelima, Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan lintas kabupaten/kota, dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh kabupaten dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada $\times 100\%$. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Sekretariat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya-upaya seperti:

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kabupaten/kota,
2. Pelaksanaan pertemuan sinkronisasi dan analisis penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/kota,
3. Monitoring dan evaluasi terkait penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1.6. Keenam, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK), dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK) dibagi seluruh fasilitas kesehatan yang ada X100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Sekretariat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(91/91) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui pelaksanaan workshop sistem informasi puskesmas, monitoring evaluasi terkait sistem informasi kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pertemuan pengelolaan dan informasi kesehatan, serta bimbingan teknis terkait validasi data kesehatan ke kabupaten/kota.

1.7. Ketujuh, Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan dengan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah layanan yang diperiksa dibagi jumlah layanan yang ada dikali 100. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh UPTD. Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Capaian

kinerja untuk indikator ini adalah $(15/16) \times 100\% = 93,75\%$ dari target 85% atau sebesar 110,29%.

UPTD. Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan menyelenggarakan 16 jenis layanan yang terdiri dari :

1. Layanan pemeriksaan Hematologi
2. Layanan pemeriksaan kimia klinik
3. Layanan pemeriksaan imunoserologi
4. Layanan pemeriksaan mikrobiologi
5. Layanan pemeriksaan kualitas udara
6. Layanan pemeriksaan uji kesehatan
7. Layanan pemeriksaan bakteriologi makanan, minuman, air, swab alat, dinding, lantai dan swab rectal
8. Layanan pemeriksaan kimia lingkungan
9. Layanan pemeriksaan toksikologi
10. Layanan pemeriksaan biomolekuler
11. Layanan pembelajaran/ kunjungan ilmiah
12. Layanan pemeriksaan fisik pasien
13. Layanan pemeriksaan EKG
14. Layanan pemeriksaan kalibrasi alkes (mengeluarkan sertifikat)
15. Layanan pemeliharaan + pengetesan dengan alat kalibrasi
16. Pemeliharaan RMC tanpa pengetesan dengan alat kalibrasi.

Di tahun 2023 layanan yang dilakukan oleh UPT. Balai Labkes sebanyak 15 jenis layanan, masih terdapat 1 jenis layanan yang belum dapat dilaksanakan yaitu layanan pemeriksaan kalibrasi alat kesehatan (mengeluarkan sertifikat). Hal tersebut di karenakan izin operasional untuk pelayanan pemeliharaan dan kalibrasi alat

kesehatan tersebut masih dalam proses pengajuan, yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja adalah menyiapkan dan mengadakan sarana dan prasarana serta petugas untuk melakukan layanan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin operasional pemeriksaan kalibrasi alat kesehatan.

Dari 7 capaian indikator kinerja program diatas, diperoleh capaian rata-rata dari indikator kinerja program ini adalah :

$(92,8\%+94,88\%+97,80\%+92,19\%+100\%+100\%+93,75\%)/7 = 95,92\%$.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 37 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
 - b) Sub kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - c) Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - d) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - e) Sub kegiatan Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke

Kabupaten/Kota

- f) Sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
 - b) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - c) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia produktif
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 - f) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - g) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan Olahraga
 - h) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - i) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - j) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan mandiri dan Tradisional Lainnya
 - k) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - l) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan haji
 - m) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

- n) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang Dengan Kecanduan NAPZA
- o) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Khusus
- p) Sub kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
- q) Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- r) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/kota
- s) Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
- t) Sub kegiatan Verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas Untuk Registrasi Puskesmas
- u) Sub kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
- v) Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- w) Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
- x) Sub kegiatan Upaya pengurangan risiko Krisis Kesehatan
- y) Sub kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - a) Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - b) Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - c) Sub kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- a) Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b) Sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
- c) Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

2. Program(2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Indikator dari program ini yaitu persentase tenaga Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi pada tahun berjalan dibagi jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi dikali 100%. Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah $(7685/9255) \times 100\% = 83,03\%$ dari target sebesar 85%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 100%. Target Tahun 2023 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota belum sesuai dengan pelatihan yang terakreditasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2296/2022 tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan sehingga pelaksanaan pelatihan tidak berjalan secara maksimal
2. Masih terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis tenaga kesehatan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

Upaya kedepan yang akan dilakukan agar target indikator kinerja program dapat tercapai :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI terkait Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan.
2. Melakukan koordinasi dengan Tim di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI terkait dengan pemberian bantuan Pendidikan tugas belajar bagi tenaga kesehatan dan dokter spesialis / sub spesialis.
3. Melakukan advokasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk penambahan anggaran Pendidikan dan pelatihan serta anggaran peningkatan kompetensi lainnya seperti anggaran untuk tugas belajar.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a) Sub Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b) Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan. Indikator dari program ini adalah Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat, dengan formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat dibagi total sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam satu tahun dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(29/32) \times 100\% = 90,62\%$ dari target sebesar 88%, dengan demikian target tahun 2023 telah tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Dilakukan pertemuan berupa sosialisasi dan pengarahan kepada terkait pemenuhan persyaratan kesehatan kepada pelaku usaha/pemilik sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
2. Melakukan pembinaan dan monitoring di sarana distribusi alat kesehatan dan sarana pedagang besar farmasi serta melakukan pertemuan evaluasi pemenuhan izin pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
3. Dilakukan pembinaan dan monitoring secara rutin ke sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
4. Pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam pemenuhan standard, persyaratan dan ketentuan.
5. Rapat evaluasi yang melibatkan stakeholder terkait yang dilakukan bersama dengan pelaku usaha.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

3. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

- a) Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengajuan PBF dan cabang PAK
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
4. Kegiatan Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- a) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT berbasis Elektronik.

Tabel III.5. Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu (Rata-rata nilai persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase sediaan farmasi alkes, makanan dan minuman dibagi 3 dikali 100%)</p> <p>$(95,92+83,03+90,62/3) \times 100\% = 89,86\%$</p>	84,5%	89,86%	106,34%

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Pendampingan dalam rangka Penurunan AKI dan AKB</p>
2.		<p style="text-align: center;">Pemberian Makanan tambahan kepada balita bermasalah gizi di Bangka Selatan</p>

Faktor Pendukung keberhasilan :

- a. Adanya dukungan dan komitmen dari Lintas sektor dan Lintas Program terkait dalam program penanggulangan HIV , Tuberkulosis , malaria dan imunisasi
- b. Adanya dukungan dana dari Hibah *Global Fund* untuk program Penanggulangan HIV, Tuberkulosis dan Malaria terutama adanya dana enabler Tuberkulosis untuk pasien Tuberkulosis untuk keberlangsungan pengobatan pasien

- c. Tersedianya logistik, baik obat-obat program (OAT/ARV/OAM) maupun logistik lainnya untuk penunjang diagnostik dalam penanggulangan HIV Tuberkulosis dan malaria serta penyakit menular lainnya
- d. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan terkait pelaksanaan program kesehatan masyarakat
- e. Koordinasi lintas sektor tang baik, khususnya dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam proses penyelesaian perizinan
- f. Adanya pendampingan dari Kementerian Kesehatan, dukungan pimpinan, lintas program dan sektor serta partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- g. Komitmen petugas provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan tugas dan fungsi memberikan informasi dan edukasi ke pelaku sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- h. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan
- i. Dukungan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik serta dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat

Faktor Penghambat keberhasilan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan masih adanya pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi sakit tidak bersedia diobati
- b. Masih adanya penolakan dalam pemberian imunisasi terutama pada anak-anak dan vaksin baru
- c. Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu (HIV/AIDS, Tuberkulosis)
- d. Penyebaran sumber daya manusia kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan

- e. Masih adanya kesulitan para pelaku usaha/sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota belum sesuai dengan pelatihan yang terakreditasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2296/2022 tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan sehingga pelaksanaan pelatihan tidak berjalan secara maksimal
- g. Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi madya (Klinik, Tempat Praktek Mandiri Dokter Umum, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi)

3.1.2. Sasaran : Meningkatnya Perilaku Masyarakat Babel Sadar Sehat

Kinerja sasaran Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Perilaku Masyarakat Babel Sadar Sehat	Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat	Rata-rata nilai persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif

Kinerja sasaran Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Rata-rata nilai persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif. Tahun 2023 capaian kinerja

sasaran ini adalah 99,02% atau sebesar 119,3% dari target 83%. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja program pendukung sasaran Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase akses sanitasi keluarga
2. Persentase (upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif

Kinerja sasaran Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat	93,26%	83%	99,02%	119,30	85%	116,49

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 99,02%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 119,30% , dengan demikian target tahun 2023 telah tercapai
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 93,26%, terhadap target tahun lalu sebesar 82% terdapat peningkatan sebesar 5,76%. Hal tersebut dikarenakan semua indikator kinerja yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran berhasil tercapai.

Faktor pendukung tercapainya target sasaran ini antara lain adanya menjalin kemitraan dan bekerjasama dengan BUMN, perusahaan swasta, ormas, organisasi profesi dan tokoh agama, tersedianya media pendukung posyandu yaitu lembar balik PMBA dan PHBS, serta adanya dukungan dana baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pertama, Persentase akses sanitasi keluarga. Adapun formula perhitungan indikator ini adalah jumlah kepala keluarga (KK) akses sarana dibagi jumlah KK yang ada dikali 100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(470.002/472.571) \times 100\% = 99,46\%$ dari target 84,5% atau sebesar 117,7%. Dengan demikian target tahun 2023 telah tercapai. Apabila dibandingkan dengan capaian 2022 yang sebesar 98,70% terjadi kenaikan 0,76%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui :

1. Pembentukan Tim Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor terkait melalui forum Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan forum-forum lainnya
3. Melakukan advokasi secara terus-menerus kepada pemerintah kabupaten/kota dan *stake holder* terkait

4. Penyampaian analisis dan *feedback* capaian indikator Program Kab/Kota setiap triwulan.

2. Kedua, Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif. Adapun formula perhitungan indikator ini adalah jumlah UKBM yang aktif dibagi seluruh UKBM yang ada dikali 100%. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(1.872/1.899) \times 100\% = 98,58\%$ dari target 81,5% atau sebesar 120,96%. Apabila capaian tahun ini dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 87,83%, terdapat kenaikan 10,75%. Hal tersebut tercapai melalui pelaksanaan upaya-upaya :

1. Melakukan edukasi dan bimbingan teknis ke upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) terkait posyandu prima
2. Penyediaan bahan bacaan terkait stunting dalam rangka penguatan kapasitas dan pengetahuan kader di UKBM
3. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait pemberdayaan masyarakat
4. Penggerakan Posyandu Aktif Tingkat Provinsi dan Pembinaan Posyandu Aktif ke 7 Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- b. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

- a) Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
- d. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

Tabel III.8. Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Partisipasi Masyarakat Sadar Sehat (Rata-rata nilai persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif = Jumlah capaian 2 indikator kinerja (persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif dibagi 2 dikali 100%) = $\{(99,46+98,58)/2\} \times 100\% = 99,02\%$	83%	99,02%	119,30%

Gambar III.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sasaran 2 Tahun 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Pembinaan Unit Pelaksana Berbasis masyarakat (UKBM) di Kabupaten</p>
2.		<p>Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan untuk Mendukung Pencapaian Indikator Kesehatan Lingkungan</p>

Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di setiap desa/kelurahan.
- b. Komitmen dan kepedulian Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap pentingnya sanitasi
- c. Adanya koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota terkait pelaksanaan program kesehatan lingkungan

- d. Adanya dukungan kemitraan dari Lintas Sektor yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan TP-PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa baik berupa kebijakan maupun anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan
- f. Dukungan anggaran, baik yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maupun APBN

Faktor penghambat keberhasilan :

- a. Masih kurang optimalnya peran pokjanal posyandu dalam melakukan pembinaan posyandu dan penguatan posyandu aktif
- b. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya sanitasi sehat.
- c. Belum optimalnya dukungan lintas program dan sektor serta partisipasi masyarakat
- d. Kurang optimalnya dukungan lintas sektor terkait, dalam mendukung program sanitasi
- e. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia kesehatan/sanitarian di kabupaten/kota dan puskesmas dalam penyelenggaraan program kesehatan lingkungan

3.1.3 Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 3/2023 Tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat diukur.

Walaupun demikian Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah pada tahun 2023 tetap dilaksanakan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai RB Perangkat Daerah	29,89	27,5	Tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja	-	27,8	-

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Untuk indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 3/2023 Tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi. Walaupun demikian unit kerja tetap melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan yang ada.

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah didukung dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan sasaran program Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator :

1.1 Pertama, Nilai SAKIP perangkat daerah dengan formula perhitungan indikator ini adalah dari Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kesehatan Provinsi yang dinilai oleh Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung. Realisasi kinerja yang digunakan pada tahun 2023 ini adalah realisasi kinerja pada tahun 2022. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh

Sekretariat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 81,51 dari target 80 atau sebesar 101,89%. Dengan demikian target tahun 2023 telah tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian/mencapai target kinerja adalah: Melakukan rapat koordinasi perencanaan lintas program, Melakukan rapat evaluasi kinerja lintas program dan Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP tahun 2022, sesuai dengan rekomendasi dari auditor yang dibuktikan dengan dokumen/data-data pendukungnya.

Adapun rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 adalah:

1. Rekomendasi pertama : Mengupayakan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dipertahankan dalam jangka masa 1 periode perencanaan strategis dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023 – 2026. Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah melaksanakan rapat terkait evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026.
2. Rekomendasi kedua : Mengupayakan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan menetapkan indikator kinerja individu (IKI) dan dilakukan pemantauan kinerja/output pegawai dengan dialog kinerja atau penilaian sejawad. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah Melakukan rapat penyusunan dan penetapan indikator kinerja individu (IKI) dan melakukan rapat pemantauan kinerja/output pegawai dengan dialog kinerja atau penilaian sejawad
3. Rekomendasi ketiga : Mengupayakan memiliki teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja yang valid dan

dapat diandalkan guna pengukuran capaian kinerja. Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah Melakukan rapat terkait Aplikasi satu data kesehatan (ASDK)

4. Rekomendasi keempat : Laporan kinerja hendaknya dapat di reviu secara berjenjang sesuai hierarki proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dengan dibuat laporan hasil reviu berjenjang. Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala
5. Rekomendasi kelima : Mengupayakan membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah Menyusun Standar operasional prosedur (SOP) teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Untuk bukti pendukung dari masing-masing rekomendasi dapat dilihat di lampiran laporan kinerja ini.

1.2 Kedua, Survei kepuasan pelayanan internal dengan formula perhitungan indikator ini adalah Tingkat kepuasan aparatur yang di ukur dari tingkat kecukupan, ketersediaan, sarana prasarana, operasional dan pelayanan administrasi kepegawaian di Dinas Kesehatan. Pada tahun 2023 diselenggarakan oleh Sekretariat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 84,54%, dari target 82% atau sebesar 103,1%.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan peralatan kantor lainnya, peningkatan pelayanan administrasi keuangan, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian serta peningkatan pelayanan administrasi umum.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semeseteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - e) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah
 - b) Sub kegiatan pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tabel III.11 Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi	27,5	Tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja	-

Gambar III.3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sasaran 3 Tahun 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Pertemuan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026</p>
2.		<p>Rapat Evaluasi Kinerja Lintas Program</p>

Faktor Pendukung keberhasilan :

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan cukup keleluasaan Dinas Kesehatan Kep. Bangka Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi
- b. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana Dinas Kesehatan Prov. Bangka Belitung
- c. Koordinasi internal dan eksternal yang baik terkait pencapaian kinerja

- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan
- e. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN

Faktor Penghambat keberhasilan :

- a. Masih perlunya peningkatan manajemen evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan
- b. Masih perlu dilakukan perbaikan dalam mekanisme pengumpulan data, baik secara manual maupun aplikasi.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu	84,5%	89,86%	106,34	69.829.207.731,-	65.227.421.447,-	93,41	12,93 (Efisien)
2.	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	83%	99,02%	119,3	994.372.487,-	905.564.010,-	91,07	27,6 (Efisien)
3.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	27,5	-	-	27.872.308.149,-	25.600.300.869,-	91,85	-
Total Belanja					112,82	98.695.888.367,-	91.733.286.326,-	92,95	19,87 (efisiensi)

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023*



Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp. 98.695.888.367,- terealisasi Rp 91.733.286.326,- atau 92,95% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 6.962.602.041,- yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi sewa tempat
- Efisiensi biaya makanan dan minuman

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus di pandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Peta Dora untuk Si Anil (Pemberdayaan kader dalam pendampingan ibu bersalin menuju persalinan yang aman)
- b. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- c. Penerapan IT dengan melalui webinar/zoom meeting dengan *stake holder* dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- d. Kanal aduan dan layanan informasi disampaikan melalui website www.dinkes.babelprov.go.id dan instagram dinkesbabel

3.5. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Viral Load HIV di Indonesia Tahun 2023
2. Provinsi dengan Kader Posyandu Terinovatif Tingkat Nasional Tahun 2023
3. Provinsi dengan Kader Terbaik dalam Penyiapan Menu Pemberian Makanan Tambahan Tingkat Nasional Tahun 2023

BAB4

Penutup

Bab 4 Berisi:

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kematian balita pada tahun 2023 sebesar 245 kasus (10,7/1000 KH), meningkat dari tahun 2022 sebesar 196 kasus (7,3/1000 KH), perlu mendapatkan perhatian.
2. Jumlah Kasus kematian ibu pada tahun 2023 adalah 38 kasus/22.886 KH (Kelahiran Hidup) kematian dari tahun sebelumnya 34 kasus/25.302 KH, perlu mendapatkan perhatian
3. Jumlah kasus hipertensi pada tahun 2023 sebesar 269.133 kasus, meningkat dari tahun 2022 sebesar 248.104 kasus; jumlah kasus diabetes mellitus tahun 2023 sebesar 28.559 kasus, mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022 sebesar 28.555 kasus; sedangkan untuk kasus kanker serviks dan kanker payudara pada tahun 2023 sebesar 107 kasus, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 92 kasus. Dengan demikian penyakit tidak menular masih menjadi masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Penyakit menular terutama kasus *Human Immuno deficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV AIDS) terus bertambah, jumlah kasus HIV tahun 2023 sebesar 297 kasus meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 276 kasus.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah :

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita dilakukan melalui advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes; Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Kematian Ibu; implementasi pemanfaatan *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN); mengoptimalkan peran dokter dalam antenatal care (ANC), pendampingan RS prioritas bagi kabupaten lokus; serta meningkatkan kualitas kunjungan neonatus dengan penerapan manajemen terpadu bayi muda.
2. Peningkatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dilakukan melalui keberadaan dan keterlibatan Pos Binaan Terpadu (Posbindu), baik dilingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun desa serta peningkatan akses pelayanan terpadu penyakit tidak menular di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular

3. Melakukan intervensi pada kelompok berisiko, peningkatan konseling dan test ibu hamil terkait HIV AIDS, terapi anti retro viral (ARV) pada anak dan orang dengan HIV AIDS (ODHA) dewasa dalam rangka pengendalian penyakit HIV AIDS
4. Membudayakan gerakan hidup sehat (Germas) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan menitikberatkan pada upaya perubahan gaya hidup sehat di masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat
5. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

DINAS KESEHATAN							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TERJIAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usah Seapas Hidup (UHS)	Tahun	71,00	71,10	71,20	71,30
	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	%	84,50	85,00	85,50	86,00
	2. Meningkatkan Perilaku Masyarakat Berbahaya Sedar Sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat (SBM dan UKB/UKM/UKH)	%	83,00	84,00	84,50	85,00
2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Produk Perangkat Daerah	Nilai	88	88	88	88
	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RE Perangkat Daerah	Nilai	27,50	27,60	27,70	27,80

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

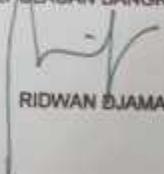
Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19670909 200112 1 001

AS5

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan Target
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	84,50%	Rata-rata nilai pertentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase layanan farmasi, alat, makanan dan minuman
2	Meningkatnya perilaku masyarakat Sehat sadar sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	63%	Rata-rata nilai persentase akses layanan keluarga dan persentase UKDM IKF
3	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	27,5	Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi

Anggaran :

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 53.941.486.700,00	APBD, DAK FISIK DAN DAK NON FISIK
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.854.243.873,00	APBD
		Programediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 129.602.300,00	APBD
		Program Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.861.026.000,00	APBN DEKONSENTRASI
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 2.759.296.000,00	APBN DEKONSENTRASI
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 2.826.709.000,00	APBN DEKONSENTRASI
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 2.003.661.000,00	APBN DEKONSENTRASI
2	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	Program Pembentayan Masyarakat Sabang Kesehatan	Rp. 802.372.467,00	APBD dan DAK NON FISIK
		Program Kesehatan Masyarakat	Rp. 1.454.708.000,00	APBN DEKONSENTRASI
3	Nilai RB perangkat daerah	Program Pemungutan Utusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 34.074.257.336,00	APBD
		Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.167.405.000,00	APBN DEKONSENTRASI

PIHAK KEDUA
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RIDWAN DJABALUDDIN

Pangkalpinang, Januari 2023
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. H. ANDRI NORTHO, MARS
PEMBAWA UTAMA MADYA
NIP. 196709092001121001

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si



dr. H. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.
NIP. 196709092001121001

A55 Dokumen ini telah dimandatangani secara elektronik yang dibuktikan oleh Data Sertifikasi Elektronik (BdSE; BSSN)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Penghitungan Target
1	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	84,50%	Rata-rata nilai persentase pemerluan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta persentase sediaan farmasi akses, makanan dan minuman
2.	Meningkatnya perilaku masyarakat Babel sadar sehat	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	83%	Rata-rata nilai persentase akses sanitasi keluarga dan persentase UKBM aktif
3.	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	27,5	Nilai reformasi birokrasi (RB) Dinas Kesehatan Provinsi

Anggaran :

N	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu	02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 66.115.690.094,00	APBD dan DAK NON FISIK
		03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.890.463.819,00	APBD
		04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 124.602.100,00	APBD
		Program Kesehatan Masyarakat	Rp 2.337.423.000,00	APBN Dekonsentrasi
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp 1.986.313.000,00	APBN Dekonsentrasi
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp 2.134.583.000,00	APBN Dekonsentrasi
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 1.813.611.000,00	APBN Dekonsentrasi

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
2	Angka partisipasi masyarakat sadar sehat	05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 994.372.487,00	APBD dan DAK NON PISIK
		Program Kesehatan Masyarakat	Rp 801.296.000,00	APBN Dekonsentrasi
3	Nilai RB perangkat daerah	01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 23.639.647.932,00	APBD
		Program Dukungan Manajemen	Rp 978.319.000,00	APBN Dekonsentrasi

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

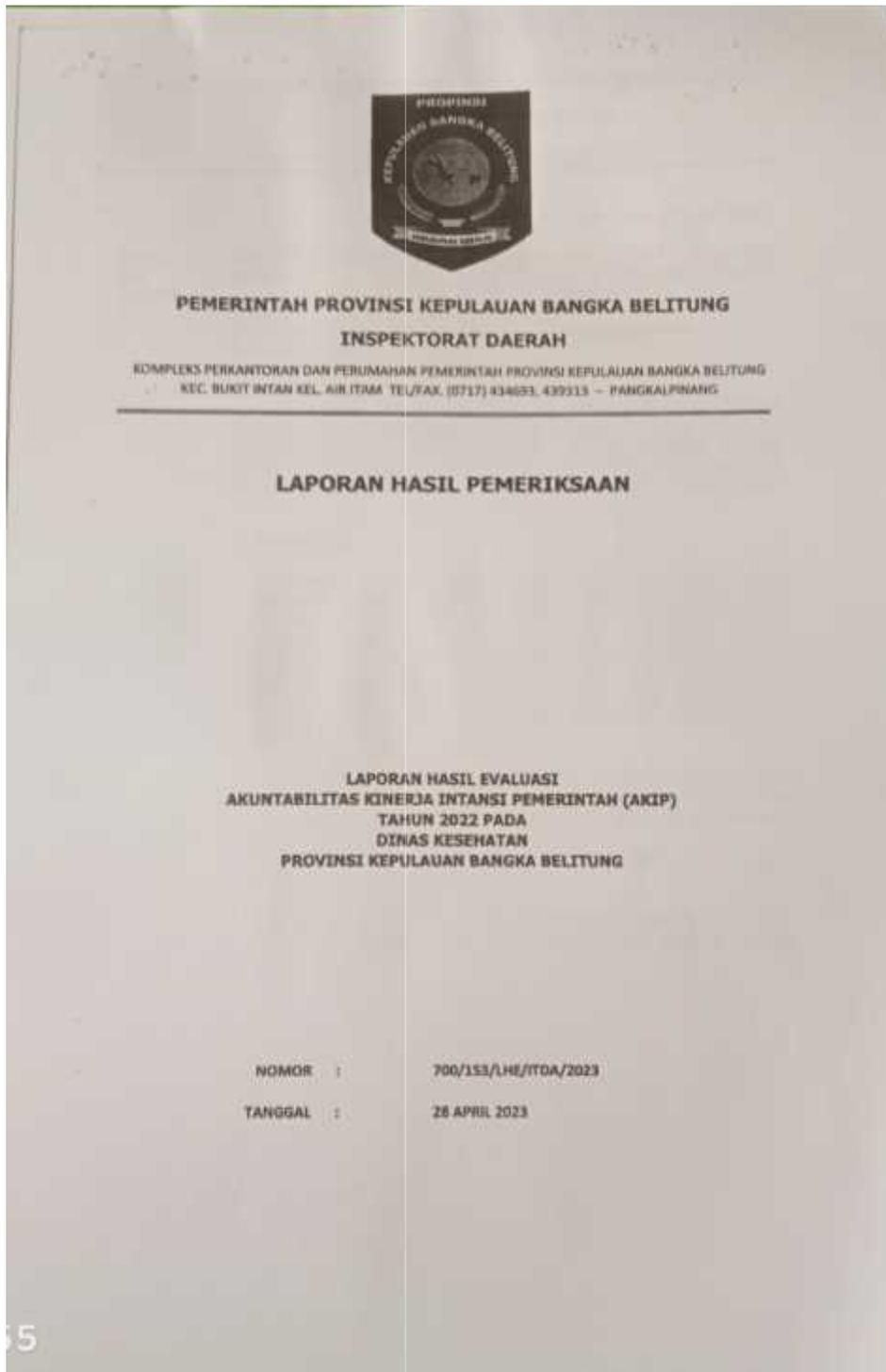

Dr. SAFRIZAL ZA, M.S.

Pangkalpinang, November 2023
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



dr. H. ANDRI NURITTO, M.A.R.S.
NIP. 196709092001121001

Lampiran 4. Evaluasi LKj Dinas Kesehatan Tahun 2023





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN

WILAYAH PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. M. YUSUF SAHIB, No. 100, BELITUNG, KEP. BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 28 April 2023

Nomor : 700/153 /LHE/ITDA/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
di -
PANGKALPINANG

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/2/EVA/ITDA/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemamfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu melakukan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja dengan dibuktikan oleh catatan-catatan, dokumentasi atau data pendukung lainnya yaitu dokumen Rencana aksi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perbulan, nota dinas undangan pertemuan pemantauan rencana aksi kinerja, Notulen rapat pemantauan rencana aksi kinerja, daftar hadir pertemuan pemantauan rencana aksi kinerja, dokumentasi, laporan pemantauan rencana aksi kinerja sebagaimana terlampir dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 81,51 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,51
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

- b. Mengupayakan setiap pegawai menamusikan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI), dan dilakukan pemantauan kinerja/output pegawai dengan dialog kinerja atau penilaian sejawat.
- c. Mengupayakan memiliki teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka pengumpulan data kinerja yang valid dan dapat diandalkan guna pengukuran capaian kinerja.
- d. Laporan kinerja hendaknya dapat direviu secara berjenjang sesuai hierarki proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dengan dibuat laporan hasil reviu berjenjang.
- e. Mengupayakan membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 1963061211985031001

Tembusan:
1) Menteri PAN dan RB;
2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 5. Tindakan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Tindakan/Tindak Lanjut	Materi/Aspek yang Berkaitan	Tempo (Tahun)	Kategori SAKIP	Basis Penilaian	Jadwal Pelaksanaan						
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	Mempertajam dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Duri No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Duri No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Duri No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Duri No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Tahun	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Misi dan Visi 2. Struktur Organisasi 3. Mekanisme Kerja 4. Sistem Kerja							
2	Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di lingkungan Kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023	Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang ada di lingkungan Kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023	1 Tahun	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Misi dan Visi 2. Struktur Organisasi 3. Mekanisme Kerja 4. Sistem Kerja							
3	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	1 Tahun	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Misi dan Visi 2. Struktur Organisasi 3. Mekanisme Kerja 4. Sistem Kerja							
4	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	1 Tahun	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Misi dan Visi 2. Struktur Organisasi 3. Mekanisme Kerja 4. Sistem Kerja							
5	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	Mengembangkan rencana strategis kecamatan Duri Kabupaten Duri dan Kecamatan Beringin Kabupaten Duri Tahun 2023-2028	1 Tahun	Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Misi dan Visi 2. Struktur Organisasi 3. Mekanisme Kerja 4. Sistem Kerja							

Disusun oleh:
 Kepala Kecamatan:
 Kepala Desa:
 Kepala RT:
 Kepala RW:

2. Tindak Lanjut Rekomendasi 2,

- a. Melakukan rapat penyusunan dan penetapan indikator kinerja individu (IKI)

- Nota Dinas



- Daftar Hadir



- Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinkes

Kepala Staf
Kelembagaan
Indikator Kinerja Individu (IKI)
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Formula Penghitungan	Target Tahun 2023	Keterangan
1	2	3	4	5
1	1. Penetapan masyarakat masyarakat-pelayanan kesehatan yang bermutu	Rata-rata nilai pelayanan kesehatan aspek kesehatan, perorangan dan aspek kesehatan masyarakat, dan layanan pengabdian kepada masyarakat dan inovasi serta pemenuhan kebutuhan farmasi, alat, material dan informasi	81,50%	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
	2. Angka partisipasi masyarakat ketercapaian TDR TB pemerintah daerah	Rata-rata nilai pelayanan akses rumah keluarga dan pemenuhan UMRK aset	85%	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
	3. Nilai DRPT pemerintah daerah	Nilai rubrikasi Internal (RI) Dinas Kesehatan Provinsi	27,5	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
2	1. Nilai DRPT pemerintah daerah	Nilai rubrikasi eksternal lembaga instansi Dinas Kesehatan Provinsi	80	ASDIY SAMADY, SH
	2. Survey kepuasan pelayanan internal	Tingkat kepuasan stakeholder yang diukur dari tingkat ketepatan, kuantitas, dan mutu pelayanan, dilaksanakan dari pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum di Dinas Kesehatan	80	ASDIY SAMADY, SH
3	Persentase kualitas pelayanan kefarmasian yang berorientasi minimal standar	Jumlah bilangan pelayanan kesehatan yang minimal sesuai standar yang dibagi dengan jumlah bilangan pelayanan kesehatan 0, 100%	85%	ARTHA F. YAMUDHAR, S.K.M, KESM
4	Persentase pengabdian dan pengabdian penyakit	Rata-rata nilai (Persentase pelayanan kesehatan: Perorangan Masyarakat + Persentase pelayanan kesehatan: Perorangan TM + Persentase pelayanan kesehatan: RSUD + Persentase pelayanan kesehatan: Puskesmas TB + Persentase pelayanan kesehatan: HIV + Persentase pelayanan kesehatan: Koleksi Sampah) + Persentase pelayanan kesehatan: produk obat (KID)	10%	ZALDIRI, S.H
5	Persentase pengabdian kesehatan masyarakat	Rata-rata nilai (Persentase pelayanan kesehatan: Perorangan + Persentase pelayanan kesehatan: Perorangan TM + Persentase pelayanan kesehatan: RSUD + Persentase pelayanan kesehatan: Puskesmas + Persentase pelayanan kesehatan: Koleksi Sampah + Persentase pelayanan kesehatan: obat produk + Persentase pelayanan kesehatan: obat produk) + Persentase pelayanan kesehatan: obat (KID)	80%	Dr. HANUTU, S.S
6	Persentase pelayanan dengan ketercapaian obat dan nilai rubrikasi	Jumlah Rubrikasi dengan ketercapaian obat dan nilai rubrikasi dibagi dengan jumlah seluruh rubrikasi obat 100%	85%	Ag. ZULKARNAINI, S.S
7	Persentase pelaksanaan pelayanan pelayanan standar pelayanan rumah sakit yang berorientasi pada mutu pelayanan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pelayanan standar pelayanan rumah sakit yang berorientasi pada mutu pelayanan dibagi dengan jumlah seluruh pelayanan rumah sakit yang berorientasi pada mutu pelayanan 100%	100%	ASDIY SAMADY, SH
8	Persentase kualitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK)	Jumlah bilangan pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK) dibagi dengan bilangan kesehatan yang ada 100%	100%	ASDIY SAMADY, SH
101	1. Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	1000000	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
102	2. Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	1000000	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
103	3. Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	1000000	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
104	4. Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	Jumlah kunjungan (KID) yang berorientasi pada mutu pelayanan	1000000	Dr. ANDRI WIRYITO, MARS

Proses Pengabdian Masyarakat
 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dr. ANDRI WIRYITO, MARS
 Kepala Dinas Kesehatan
 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Dokumentasi

Rapat Koordinasi Kinerja/Output (Kabwil)
Tgl: 14 November 2024



- Notulen rapat



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN

Jalanway, Amambakab, Kota Bangkabelitung, Kepulauan Bangka Belitung, 36121
Jl. Sekeloa Timur No. 100, Kota Bangkabelitung, Kepulauan Bangka Belitung, 36121

[NOTULEN RAPAT]

<p>TARIK RAPAT Hari / Tanggal Waktu Tempat</p> <p>Peserta Rapat</p> <p>HAJIR RAPAT</p>	<p>1. Rapat Koordinasi Kinerja/Rapat Pagowil Selasa, 14 November 2024 08:00 s.d. 11:00 WIB Kantor / Subkantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkalajene Kepulauan Pangkalajene</p> <p>2. Peserta terdiri dari Kepala Dinas, Kabid, Kasit, Kasubag dan Subkoordinasi di BinaKantun Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>3. Untuk melaksanakan fungsi dan peran masing-masing, antara lain sebagai berikut: a. Memastikan terdapat seluruh anggota tim yang telah ditunjuk. b. Menanyakan status pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah terkait pelaksanaan KPI. Kemudian dicari penyebab penyebab KPI yang belum terlaksana, kemudian berdiskusi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab KPI terlambat. c. Untuk memastikan data pelaksana benar-benar yang telah terdapat pada KPI yang akan dilaksanakan, maka dilakukan diskusi dengan seluruh KPI yang akan dilaksanakan. d. Untuk memastikan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan KPI yang akan dilaksanakan. e. Untuk memastikan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan KPI yang akan dilaksanakan.</p>
---	--

Disusun oleh:
Siska Nur Hafidza

Siska Nur Hafidza

PEMANGKALAJENE, 14
NOVEMBER 2024

Disetujui Kepala:
Siska Nur Hafidza

Siska Nur Hafidza

PEMANGKALAJENE, 14
NOVEMBER 2024

- Laporan pemantauan kinerja/output pegawai

Laporan Pemantauan Indikator Kinerja Individu (IKI)
 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian	Keberhasilan	Pengguna
1	Mendukung terwujudnya peningkatan persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar tahun 2022	85%	80,83%	100,00%		Dr. WIDHI SURYITIO, MARS Dr. WIDHI SURYITIO, MARS
2	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	27,3	0	0,00%	Pada tahun 2022, belum ada hasil data yang tertera	Dr. WIDHI SURYITIO, MARS
3	1. Mula DMPT di wilayah dasar	80	81,51	101,89%		SELLO MANSURY, ST
3	2. Rasio capaian pelayanan kesehatan	81	8	9,88%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	SELLO MANSURY, ST
4	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	80%	80,33%	100,67%		ROSAH S. TABRIZI, S.KM, A.Md
4	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	80%	70,33%	87,92%		ROSAH S.
4	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	80%	81%	101,25%		Dr. SURYITIO, MARS
5	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	81%	80%	100,00%		Dr. SURYITIO, MARS
5	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	100%	100%	100,00%		SELLO MANSURY, ST
6	Mendukung terwujudnya persentase kesehatan yang berkinerja tinggi pada tingkat pelayanan dasar	100%	100%	100,00%		SELLO MANSURY, ST

16	Amplifikasi pemantauan kesehatan risiko penyakit-penyakit zoonosis yang terdapat di daerah	4 orang	3 orang	75,00%		DR. FENNY, E.E.S, S.E, Dr
16	Pemantauan Kematian Rata-rata yang merupakan indikator pelayanan kesehatan. Pemantauan ini akan dilaksanakan untuk UMR upakim, LKRS dan UMR kegiatan tingkat daerah Provinsi	80%	80%	100%		PERWATI TERAWATI, S.KM
17	Pemantauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Realisasi Kesehatan di Puskesmas	80%	80%	100%		ROHMADI DENISE TIGAH IN, MM
17	Pemantauan kekinerja dengan ketercapaian dan kemajuan	80%	80,11%	100,27%		Ag. JULIANDE, S.S
18	Pemantauan Kematian Rata-rata yang merupakan indikator pelayanan kesehatan di kabupaten	80%	80%	100%		PERWATI TERAWATI, S.KM
19	Pemantauan kekinerja KEM	80%	80,25%	100%		ROHMADI DENISE TIGAH IN, MM
20	Pemantauan kekinerja KEM	80%	80%	100%		ROHMADI DENISE TIGAH IN, MM

104	1. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	14 kecamatan	14 kecamatan	100,00%		DEWI SURYATI, S.KM, A.Md
104	2. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	1 kecamatan	0	0%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	PERWATI TERAWATI, S.KM
107	1. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	1 kecamatan	0	0%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	Ag. ROHMADI DENISE TIGAH IN, MM
108	2. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	1 kecamatan	0	0%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	DEWI SURYATI, S.KM, A.Md
109	3. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	1 kecamatan	0	0%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	DEWI SURYATI, S.KM, A.Md
111	4. Jumlah Tim Penggerak PKK yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan kegiatan	1 kecamatan	0	0%	Belum tercapai persentase persentase kesehatan	DEWI SURYATI, S.KM, A.Md

Perhitungannya, 14 November 2022
 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Signature)
 Dr. H. ABRI SURYITIO, MARS
 Puskesmas Lingsar Melayu
 1807 - 080110000 0001 12 1 0001

- Daftar hadir

KORPRI KAWASAN BANTEN DAN MERANGIN II 2017-2018
 DI RUMAH POLYMER 1, JI. RAJAWALAYATI, PURWOREJO, SURABAYA
 Tanggal: 10 Agustus 2017

NO	NAMA	NIK	ORGANISASI	TANDA TANGAN
1	Dr. Prita Nurita AMIK	196308021990001	Polri	[Signature]
2	Kiki Mulyati	196508021990001	Polri	[Signature]
3	Hafid	197008021990001	Polri	[Signature]
4	Pradono W. A.	195808021990001	Sub. brand	[Signature]
5	Amica M.	198008021990001	Staf Pemasangan	[Signature]
6	Yuli Anitany	198108021990001	Polri	[Signature]
7	Rohi Susanto	196008021990001	Polri	[Signature]
8	Meliana R.	198008021990001	Polri	[Signature]
9	Rizki	198008021990001	Polri	[Signature]
10	Prigati	198008021990001	Polri	[Signature]
11	Hastuti	197008021990001	Polri	[Signature]
12	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
13	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
14	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
15	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
16	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
17	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
18	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
19	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
20	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
21	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
22	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
23	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
24	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]
25	[Name]	198008021990001	Polri	[Signature]

- Notulen rapat

KORPRI KAWASAN BANTEN DAN MERANGIN II 2017-2018
 DI RUMAH POLYMER 1, JI. RAJAWALAYATI, PURWOREJO, SURABAYA
 Tanggal: 10 Agustus 2017

DAFTAR HADIR

1. Dr. Prita Nurita AMIK
 2. Kiki Mulyati
 3. Hafid
 4. Pradono W. A.
 5. Amica M.
 6. Yuli Anitany
 7. Rohi Susanto
 8. Meliana R.
 9. Rizki
 10. Prigati
 11. Hastuti
 12. [Name]
 13. [Name]
 14. [Name]
 15. [Name]
 16. [Name]
 17. [Name]
 18. [Name]
 19. [Name]
 20. [Name]
 21. [Name]
 22. [Name]
 23. [Name]
 24. [Name]
 25. [Name]

KORPRI KAWASAN BANTEN DAN MERANGIN II 2017-2018
 DI RUMAH POLYMER 1, JI. RAJAWALAYATI, PURWOREJO, SURABAYA
 Tanggal: 10 Agustus 2017

DAFTAR HADIR

1. Dr. Prita Nurita AMIK
 2. Kiki Mulyati
 3. Hafid
 4. Pradono W. A.
 5. Amica M.
 6. Yuli Anitany
 7. Rohi Susanto
 8. Meliana R.
 9. Rizki
 10. Prigati
 11. Hastuti
 12. [Name]
 13. [Name]
 14. [Name]
 15. [Name]
 16. [Name]
 17. [Name]
 18. [Name]
 19. [Name]
 20. [Name]
 21. [Name]
 22. [Name]
 23. [Name]
 24. [Name]
 25. [Name]

KORPRI KAWASAN BANTEN DAN MERANGIN II 2017-2018
 DI RUMAH POLYMER 1, JI. RAJAWALAYATI, PURWOREJO, SURABAYA
 Tanggal: 10 Agustus 2017

DAFTAR HADIR

1. Dr. Prita Nurita AMIK
 2. Kiki Mulyati
 3. Hafid
 4. Pradono W. A.
 5. Amica M.
 6. Yuli Anitany
 7. Rohi Susanto
 8. Meliana R.
 9. Rizki
 10. Prigati
 11. Hastuti
 12. [Name]
 13. [Name]
 14. [Name]
 15. [Name]
 16. [Name]
 17. [Name]
 18. [Name]
 19. [Name]
 20. [Name]
 21. [Name]
 22. [Name]
 23. [Name]
 24. [Name]
 25. [Name]

- Dokumentasi rapat

| Rapat Rutin Kerja Tim Luasda 11 Tahun 2024

Senin, 10 Oktober 2023



- Laporan pemantauan hasil revidi berjenjang

LAPORAN PEMANTAUAN BERJENJANG
SISWA KESEHATAN PERENCANAAN KELUARGA (SKPK) BERTINGKAT
TINGKATAN III TAHUN 2023

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) / Eviden 3

No	Gedera Utama	Indikator Kinerja Utama	Sesuai 2022			Target Tahun 2023		Bahan-bahan
			Target (%)	Realisasi (%)	Perubahan (%)	Target (%)	Perubahan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Menghasilkan perubahan perilaku yang berkesan	1. Persepsi yang benar mengenai pentingnya penyediaan kontrasepsi yang berkesan	52.75	58.24	10.15	44.50%	50.00	
2	2. Menghasilkan perubahan sikap yang berkesan	2. Sikap yang benar terhadap kontrasepsi yang berkesan	50.00	48.0	-	40%	111.00	
3	3. Menghasilkan tingkah laku yang berkesan	3.1. Mengambil keputusan yang berkesan	27.5	0	-0.00%	27.5	0.00	
Jumlah keseluruhan					10.15		10.00	

4. Indikator Kinerja Program (IKP) / Eviden 4

No	Program	Indikator Kinerja (IKP)	Sesuai 2022			Target Tahun 2023		Bahan-bahan
			Target	Realisasi	Perubahan (%)	Target (%)	Perubahan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1. Program Fasilitasi Akses Kontrasepsi Terapi Aborsi	1.1. Laju kadar pemangan berkesan 1.2. Laju kadar pemangan berterusan	80	81.00	-	80	100.00%	
2	2. Program Peningkatan Literasi Kesihatan Perencanaan Keluarga	2.1. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan 2.2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 2.3. Peningkatan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan 2.4. Peningkatan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan	84 80.75 80.00	85.5 78.34 85.82	100.00 96.94 107.28	80 80 80	100.00 97.38 107.25	

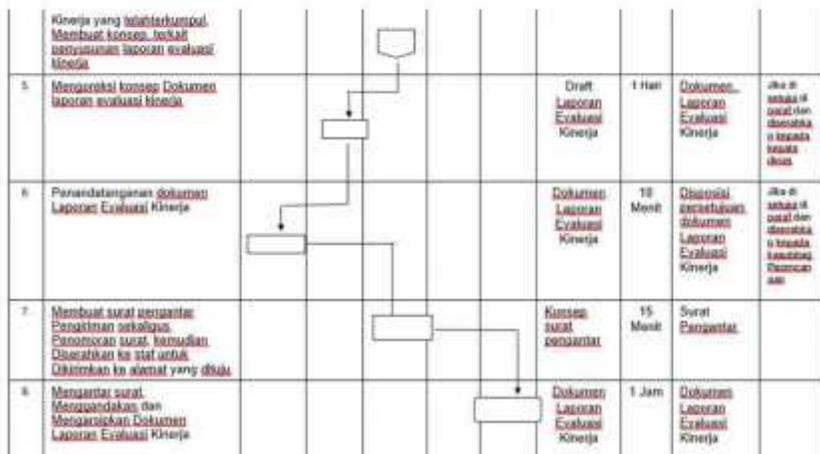
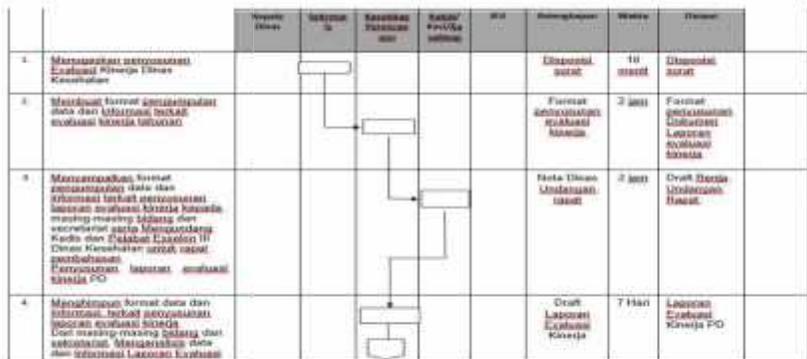
5. Indikator Kinerja Mutu (IKM) / Eviden 5

No	Program	Mugkatan	Indikator Kinerja Mutu	Target Tahun 2022			Target Tahun 2023		M&S
				Target	Realisasi	Perubahan (%)	Target (%)	Perubahan (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1. Program Fasilitasi Akses Kontrasepsi Terapi Aborsi	1.1. Laju kadar pemangan berkesan 1.2. Laju kadar pemangan berterusan	80	81.00	-	80	100.00%	100%	
2	2. Program Peningkatan Literasi Kesihatan Perencanaan Keluarga	2.1. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan 2.2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 2.3. Peningkatan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan 2.4. Peningkatan pengetahuan tentang kontrasepsi yang berkesan	84 80.75 80.00	85.5 78.34 85.82	100.00 96.94 107.28	80 80 80	100.00 97.38 107.25	100%	
3	3. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	3.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 3.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 3.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 3.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	
4	4. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	4.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 4.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 4.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 4.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	
5	5. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	5.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 5.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 5.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 5.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	
6	6. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	6.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 6.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 6.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 6.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	
7	7. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	7.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 7.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 7.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 7.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	
8	8. Program Kesedaran dan Pemahaman tentang Kontrasepsi yang Berkesan	8.1. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 8.2. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 8.3. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan 8.4. Kesedaran dan pemahaman tentang kontrasepsi yang berkesan	80 80 80 80	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	80 80 80 80	100.00 100.00 100.00 100.00	100%	

5. Tindak Lanjut Rekomendasi 5, Menyusun standar operasional prosedur (SOP)

- Standar operasional prosedur (SOP) teknis evaluasi akuntabilitas

No.	Regulasi	Penyusunan	Waktu Pelaksanaan	Isi
			Tanggal Pembuatan: 30 Desember 2021 Tanggal Revisi: 2 Januari 2022 Tanggal Pengesahan: 2022 Dibuatkan oleh: Kepala Dinas Kesehatan  Dr. Budi Hartono, MARS NIP. 19670903 200112 1 001	
	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN			PERNYATAAN LAKSANAAN EVALUASI KINERJA PD
	DAFTAR HURUF		KUALITAS PELAYANAN	
	1. Peraturan kepala PAH & HP Nomor 29 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Subunit/Unit Pemerintah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2000 tentang Tata cara, Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Fasilitas		1. Manual Pelaksanaan D3	
	PETRAKATAN 1. SOP Ases cepat online dan offline 2. SOP Pengisian Data dan Laporan 3. SOP Pelaksanaan Laporan Kinerja		PERALATAN/PERSERAPAN 1. Komputer yang terhubung dengan internet 2. Printer 3. Format pelaksanaan Laporan Kinerja Kinerja	
	PERALATAN Jika ada, ditunjukkan lokasi SOP, data primer, Laporan Kinerja PD di level unit, instansi, lokasi		PENCATATAN DAN REKAMATAH Berkas, Ekstensi, Nama file, dan Nama Unit, Dinas Kesehatan	



Lampiran 6. SK IKU .Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
Komplek Pemerintahan dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Ali (Batu Kasa), Bukti, Iliria-Pangkalpinang
telp (0717) 479304 - 4071714-39065.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/26/DINKES/2023

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Meskipun :
- a. telah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, akan berimplikasi terhadap perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. telah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri F);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DINAS,



dr. H. ANDRI NURTITO, M.A.R.S.
196/05/09/2001121001

Lampiran 7. Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

